



7

Regsosek: Isu dan Tantangan Meretas Angka di Bentang Alam Manokwari

Djoko Puguh Wibowo & Yudha Raphael

A. Menantang Bahaya, Menoreh Angka: Pengantar

Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di ujung timur Indonesia. Dikenal dunia dengan wisata alamnya yang memanjakan mata, warisan budaya yang tidak pernah luntur dimakan zaman, serta kehadiran hewan endemik, seperti burung cenderawasih dan burung kasuari menjadikan Papua Barat layaknya kepingan surga yang turun ke bumi. Dari beberapa tempat wisata di Papua Barat, Raja Ampat saat ini tentunya menjadi destinasi yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan lokal dan asing. Keanekaragaman spesies dan deretan terumbu karang yang tersusun rapi tentunya membuat banyak wisatawan berlomba-lomba untuk datang dan menikmati setiap jengkal keindahan yang ada di Raja Ampat. Taman Nasional Teluk Cenderawasih juga tidak kalah indahnnya. Pulau Nusrowi, Roon,

D. P. Wibowo & Y. Raphael

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: djok022@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Wibowo, D. P. & Raphael, Y. (2023). Regsosek: Isu dan tantangan meretas angka di bentang alam Manokwari. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (261–300). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c700 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Rumberpon, Mioswaar, dan Yoop adalah wilayah cakupan Taman Nasional Teluk Cenderawasi. Beragam terumbu karang dan berbagai jenis ikan hidup dengan bebas, bahkan beberapa wisatawan jika beruntung bisa melihat kehadiran hiu paus yang menyelam bebas di Taman Nasional Teluk Cenderawasih.

Dari segala keindahan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Barat, mata kami tertuju kepada Kabupaten Manokwari. Berdekatan dengan bandara dan pelabuhan tentunya menjadi keunggulan tersendiri untuk Kabupaten Manokwari. Terdapat fakta menarik terkait dengan fenomena kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Manokwari. Mengacu pada data BPS Kabupaten Manokwari, jumlah penduduk miskin Kabupaten Manokwari pada tahun 2016–2020 mengalami penurunan yang lumayan signifikan, dari 40,28 (dalam ribu) turun menjadi 35,92 (dalam ribu) pada tahun 2020 (BPS Provinsi Papua Barat, 2022). Indeks pembangunan manusia Kabupaten Manokwari pada tahun 2016 adalah 70,34% dan naik menjadi 72,01% pada tahun 2020 (BPS Provinsi Papua Barat, 2022). Bila mengacu pada data ini, tentunya keadaan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari.

Namun, setelah ditelusuri lebih dalam, menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Manokwari, terdapat dua kecamatan yang belum memiliki desa dengan status berkembang. Kecamatan tersebut adalah Tanah Rubu dan Warmare (BPS Kabupaten Manokwari, 2022). Status dua desa pada kecamatan tersebut mayoritas adalah sangat tertinggal dan tertinggal. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa dua kecamatan tersebut tidak ada satupun desa yang memiliki status *berkembang*? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk kami dalam meninjau langsung kondisi sosial ekonomi yang ada di kecamatan tersebut.

Program Regsosek yang dilakukan mempunyai tujuan mengumpulkan seluruh data penduduk yang berfokus pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Informasi yang dikumpulkan oleh BPS, termasuk detail di antaranya, adalah kepemilikan aset, kondisi sanitasi air bersih, kondisi perumahan, serta tingkat kesejahteraan. Tepat sasaran menjadi tujuan akhir dari program Regsosek yang

sekarang telah berjalan. Maksud dari tepat sasaran adalah setiap data yang telah terkumpul akan menjadi dasar pemerintah untuk melakukan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah serta saling terintegrasi dari satu daerah ke daerah lain. Diharapkan juga melalui Regsosek, tidak terjadi lagi duplikasi data antarinstansi pemerintah sehingga keseluruhan data terkait dengan sosial ekonomi masyarakat hanya *satu pintu* dan dikelola oleh BPS.

Perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui program Regsosek tentunya perlu mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah daerah. Pimpinan masing-masing daerah dapat melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh perangkat daerah, bahkan sampai kepada kepala kampung. Bila hal ini dilakukan, masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Manokwari pastinya akan menyambut dengan antusias program Regsosek yang dilakukan oleh BPS. Pada bab selanjutnya, kami bersama dengan petugas BPS Manokwari akan menyusuri sudut-sudut desa sembari melakukan pendataan serta melihat langsung kondisi sosial ekonomi dari masyarakat.

B. Bentang Alam Tersulit Tanah Papua Barat

Konfigurasi sebagai negara kepulauan menjadi salah satu tantangan Indonesia untuk melaksanakan Pendataan Awal Regsosek tahun 2022. Keragaman geografi bentang alam wilayah pegunungan, pulau kecil terluar, wilayah terpencil dengan karakter sosial budaya, dan adat istiadat yang berbeda mengakibatkan operasionalisasi pendataan makin kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang berbeda di setiap wilayah untuk menarasikan peta bisnis dan mekanisme kerja untuk mendapat data secara cepat dan akurat. Kabupaten Manokwari adalah bagian dari bentang alam Tanah Papua, mempunyai lanskap geografi dan sosial budaya yang kompleks dengan status tertinggal. Kabupaten ini menjadi salah satu unit pengamatan untuk mendokumentasikan proses kegiatan Regsosek secara emik sebagai pembelajaran tentang potensi dan kendala membangun satu data Indonesia. Untuk memperoleh gambaran di tingkat mikro, dalam

tulisan ini juga akan dideskripsikan secara rinci lanskap, tantangan, dan permasalahan salah satu desa dengan status tertinggal yang berada dalam wilayah Kabupaten Manokwari.



Sumber: Petatematikindo (t.t)

Gambar 7.1 Peta Adminisitrasi Kabupaten Manokwari

Kabupaten Manokwari terletak di pantai utara “kepala burung” Pulau Papua. Kota ini mempunyai beberapa sebutan, yaitu kota pemerintahan tertua di Papua dan kota Injil. Sebutan sebagai kota pemerintahan tertua merujuk pada fakta sejarah tentang pengangkatan J.J. Van Oosterezee sebagai *Controlleer Afdeling Noord Nieuw Guenia* berkedudukan di Manokwari pada tanggal 8 November tahun 1898. Penamaan sebagai kota Injil mengacu pada fakta bahwa Injil pertama kali disebarkan misionaris Jerman yang bernama Carel Willem Ottow dan Johann Gottlob Geissler pertama kali di Tanah Papua oleh misionaris Jerman disebarkan tepatnya di Pulau Kasiman pada 5 Februari tahun 1858.

Sejak tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat, Kota Manokwari ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Luas wilayah 3.186,28 km² membentang dari Teluk Doresi sampai menjelang batas Pegunungan Arfak. Batas wilayah di sebelah selatan

adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rabauw dan di sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Secara administratif, kota ini terdiri dari 9 distrik, yaitu Distrik Warmare, Prafi, Tanah Rubu, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokwari Selatan, Masni, Sidey Warmare, dan Manokwari Timur. Beberapa suku di Manokwari ialah Arfak, Mawesa, Samuri, Sebyar, Irarutu, dan Numfor Biak, sedangkan etnis pendatang terdiri atas suku Jawa, Bugis, Toraja, dan Ambon.

Suku terbesar adalah suku Arfak yang mendiami Pegunungan Arfak, Distrik Tanah Rubu, Distrik Warmare, dan sebagian mendiami wilayah pesisir/pantai. Penduduk pendatang yang berasal dari suku Jawa didatangkan melalui program transmigrasi dan terkonsentrasi pada Distrik Prafi, Warmare, Masni, Oransbari, dan Ransiki. Jumlah penduduk sebanyak 192.663 orang terdiri dari penduduk perempuan 100.006 orang (51,91%) dan penduduk laki-laki 92.657 orang (48,09%). Kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari pada tahun 2020 mencapai 56,3 jiwa/km². Distrik atau kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Distrik Manokwari Barat, sedangkan distrik dengan kepadatan penduduk paling kecil adalah Distrik Tanah Rubu dengan tingkat persentase jumlah penduduk sebesar 1,98% (BPS Kabupaten Manokwari, 2022).

Ketika menyusuri Kota Manokwari terlihat dengan jelas berbagai pembangunan infrastruktur, seperti perluasan landasan pacu bandara, jembatan layang, pusat pemerintah provinsi, pembangunan pusat pertokoan baru, dan perhotelan baru di berbagai lokasi strategis dan di luar kota. Di sisi lain, di balik gencarnya pembangunan tersebut, selain menghasilkan beberapa kemajuan juga masih menyisakan beberapa persoalan untuk segera dipecahkan. Ditinjau dari keberhasilan yang di antaranya diindikasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Manokwari di tahun 2020 mencapai 72,01, mengalami kenaikan sebesar 0,34 jika dibandingkan IPM tahun 2019 dengan nilai 71,67 (Gambar 7.2). IPM Kabupaten Manokwari menempati peringkat kedua tertinggi se-wilayah Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai IPM tertinggi adalah Kabupaten Sorong dengan nilai IPM 78,45.



Sumber: BPS Kabupaten Manokwari (2021)

Gambar 7.2 Kondisi IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2020

Paling tidak masih terdapat dua tantangan yang menjadi agenda prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manokwari. *Pertama*, dari jumlah penduduk 35.920 orang masih terdapat penduduk yang menyanggah status miskin sebesar 20,16%, sedangkan penduduk dengan status miskin ekstrem sebesar 15,05%. *Kedua*, berdasarkan pemeringkatan status desa tahun 2022, nilai rata-rata indeks desa membangun (IDM) tingkat Provinsi Papua Barat sebesar 0,5184 dengan status tertinggal. Dalam arti lain, berdasarkan nilai rata-rata tersebut, seluruh desa di Papua Barat termasuk dalam kategori tertinggal. Dari uraian tersebut, tecermin bahwa isu dan tantangan pembangunan bentang alam Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, mempunyai spektrum yang luas. Tantangan tersulit tidak terbatas pada aspek geografis semata, tetapi persoalan tersebut mempunyai implikasi ikutan sehingga menghambat laju percepatan peningkatan kesejahteraan. Pemahaman atas persoalan bentang alam dalam skala lebih mikro di Kabupaten Manokwari akan menjadi penting.

Ketika berdiskusi dengan Kepala BPS Kabupaten Manokwari yang didampingi dua orang stafnya, ada satu informasi menarik. Salah satu staf BPS Kabupaten akan mengunjungi salah satu desa di wilayah Distrik Warmare untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Regsosek 2022. *Monitoring* itu akan dilakukan pada sampel kurang lebih 5–6 responden yang sebelumnya telah didata oleh seorang PPL. Kebetulan desa yang akan dikunjungi sebagian besar penduduknya *saudara asli Papua* (SAP). Dalam konteks ini, Papua menggunakan diksi itu lebih egaliter, tidak berjarak dibandingkan istilah *orang asli Papua* (OAP) yang selama ini digunakan dalam berbagai narasi, baik oleh pejabat pusat, daerah, peneliti, maupun orang luar Papua. Diksi OAP mencerminkan suatu jarak sosial yang dapat memberikan penajaman terhadap perbedaan sosial. Dalam pandangan penulis pribadi, diksi itu dapat melebarkan jarak sosial yang tajam sebab secara tegas bermakna “dia, mereka, dan saya” yang seharusnya adalah “kita”. Berdasarkan saran dan pertimbangan waktu, dipilihlah satu desa di Distrik Warmare dengan mayoritas penduduknya adalah SAP untuk menggambarkan kesulitan bentang awal dalam lingkup mikro di wilayah Manokwari.

Menyusuri “Ketinggalan” Desa di Kabupaten Manokwari

Kami bertiga berangkat menuju Warmare menggunakan kendaraan roda dua sekitar pukul 09.00. Lalu lintas pagi Kota Manokwari sudah ramai dan padat. Aktivitas masyarakat untuk bekerja, baik dari luar kota maupun dari dalam kota, menambah kemacetan di setiap persimpangan. Sepanjang jalan menuju Warmare terlihat geliat perekonomian yang sedang berkembang. Di kiri dan kanan tampak bangunan baru pertokoan, ruang pameran dan penjualan mobil, toko serbaada, toko pakaian, bengkel, warung makan dan restoran, serta deretan warung yang menjajakan kue basah. Sesekali tampak lapak kecil yang dijaga SAP menjajakan buah-buahan. Pemandangan lain yang tampak adalah sekolah keagamaan yang berdiri megah dengan bangunan ibadah yang dilengkapi dengan ruang belajar dan mungkin asrama.

Keriuhan lalu lintas makin ramai ketika memasuki wilayah yang dari jauh terlihat cerobong dan bangunan beton melintang memotong jalan raya Manokwari menuju Warmare. Bangunan beton itu ternyata ban berjalan yang mengangkut bahan semen untuk diproses, sedangkan bangunan beton menjulang itu cerobong asap untuk membuang partikel berbahaya ke udara. Di simpang tiga yang menghubungkan Kota Manokwari, Kota Bintuni, dan Sorong itu merupakan area pabrik Semen Maruni yang dimiliki oleh PT SDIC Papua Cement Indonesia. Di sekitar area pabrik, juga berdiri beberapa bangunan masif berbentuk kotak memanjang dan bertingkat yang berfungsi sebagai tempat tinggal karyawan, lapangan olahraga, dan fasilitas kesehatan. Selepas melewati kompleks pabrik semen tersebut, seketika terlintas pertanyaan dalam benak saya. Apakah kekayaan bentang alam Manokwari dalam bentuk perbukitan kapur (*karst*) yang telah dieksplorasi itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan?

Dalam banyak kasus di Tanah Papua, eksploitasi sumber daya dalam skala besar masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesempatan kerja, perluasan peluang usaha, dan keadilan masyarakat sekitar. Sebaliknya, masih menyisakan persoalan dan menjadi isu lokal maupun global. Demikian halnya dengan keberadaan pabrik semen Maruni di Manokwari, dalam catatan awalnya, Kelly Dowansiba (2020) menyatakan bahwa keberadaan industri semen tersebut mempunyai dampak terhadap kerusakan lingkungan (perubahan bentang alam, hidrologi, kepunahan flora dan fauna, dan pencemaran lingkungan). Dari aspek sosial, keberadaan pabrik semen yang diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan pendapatan, di dalam praktiknya jauh dari yang diharapkan. Pandangan tersebut tergambar saat memasuki desa yang tidak jauh dari lokasi pabrik semen itu. Kampung SAP tampak sepi. Bangunan rumah berbahan kayu, tak berpagar, dan berderet di pinggir jalan berlapis aspal menuju Warmare dan Sorong itu tidak tampak adanya aktivitas ekonomi produktif. Hampir tidak ditemui warung dan toko yang menjual kebutuhan harian. Halaman rumah terlihat rimbun dikelilingi tanaman buah dan

tanaman keras lainnya. Pemandangan itu terlihat hampir sepanjang jalan menuju Warmare. Di antara hutan di kiri kanan jalan beraspal, sesekali tampak desa yang kelihatan lebih ramai dengan bangunan rumah permanen, identitas keagamaan, dan rumah ibadah yang tampak bersih dan rapi.

Memasuki Desa Dindey yang berfungsi sebagai ibu kota Distrik Warmare, pemandangan tampak lebih menggambarkan bahwa desa tersebut di samping sebagai pusat pemerintahan, juga berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan desa-desa sekitar. Sebagai ibu kota distrik, selain terdapat kantor kecamatan, kantor kepolisian resor (polres), kantor rayon militer (koramil), pusat pertokoan, dan warung, juga terdapat terminal (walaupun sepi), rumah ibadah Kristen dan Islam, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Untuk menuju desa dengan mayoritas SAP, kami bertiga menemui Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) bernama FR yang rumahnya di samping terminal Dndey. FR adalah satu-satunya PML perempuan di Distrik Warmare dan saat ini masih menempuh pendidikan di Universitas Papua (UNIPA) Fakultas Arsitektur semester lima. Ia mempunyai pengalaman dalam kegiatan yang dilakukan oleh BPS kabupaten Manokwari, yaitu sebagai Petugas Pendataan Lapangan (PPL) Sensus Penduduk tahun 2020. Dalam pendataan Regsosek, Ia membawahi empat PPL, satu orang laki-laki mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Fakultas Kesehatan jasmani, dan tiga orang perempuan yang semuanya masih kuliah di UNISPA.

Jarak Desa Nimbay kurang lebih 10 km dari ibu kota Distrik Warmare. Desa ini terletak di ruas jalan raya Manokwari-Sorong. Ketika menjelang memasuki Nimbay, terdapat lahan tegalan dengan tanaman jagung, singkong, dan sayuran yang ditanam berselang-seling dan beberapa petani SAP sedang membersihkan rumput dan ilalang. Di sisi ruas jalan terdapat rumah indah berdiri megah dan kompleks perumahan baru. Demikian juga ketika memasuki jalan desa dengan konstruksi tanah yang telah diperkeras lapisan batu, terlihat bangunan rumah ibadah dan bangunan permanen rumah penduduk. Di belakang rumah berdiri bangunan toilet permanen

dengan bentuk seragam dan aneka tanaman buah-buahan seperti pisang, rambutan, manga, dan nangka, serta tanaman singkong dan talas.

Setelah mengelilingi Desa Nimbay, secara fisik, tidak tecermin bahwa desa itu berstatus sebagai desa tertinggal. Dari hasil penilaian IDM tahun 2022, status sebagai desa tertinggal terlihat dari nilai IDM sebesar 0,5594. Dalam perhitungan, nilai IDM terdiri dari komposit indeks ketahanan sosial (IKS) sebesar 0,6114, indeks ketahanan ekonomi (IKE) 0,4000, dan indeks ketahanan lingkungan (IKL) 0,6667 (Ditjen PDP Kemendesa, 2022). Bila membandingkan nilai dasar setiap indeks pembentuk IDM, IKE mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dua indeks lainnya. Hal ini juga menggambarkan bahwa aktivitas produksi dan ekonomi masyarakat belum optimal dan mencapai skala ekonomi.

Dari hasil diskusi dengan aparat kampung dan beberapa warga Desa Dindey terungkap bahwa perekonomian desa tidak berkembang disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, aktivitas pertanian masih dilakukan secara tradisional, hanya cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga hasil produksi, dan masih terbatas pada pemenuhan kehidupan rumah tangga. *Kedua*, hasil produksi tanaman buah-buahan hanya dijual di tingkat lokal dengan harga rendah. *Ketiga*, belum dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berfungsi sebagai penyedia sarana produksi, membantu penyediaan modal, dan pemasaran hasil produksi. *Keempat*, terbatasnya sarana transportasi untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dari desa ke pusat pelayanan dan pemasaran wilayah (kecamatan, kabupaten).

Uraian sebelumnya memberi gambaran bahwa tantangan utama/tersulit bentang alam, khususnya wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, bukan semata terbatas pada aspek lanskap geografi. Namun, juga terjadi kecenderungan bahwa pembangunan fisik dalam wujud infrastruktur tidak serta-merta mampu meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa antara desa dan pusat pelayanan dan pemasaran hasil.

Kehadiran industri berbasis sumber daya wilayah dalam kenyataan tidak serta-merta mampu memberikan perluasan kesempatan kerja dan berusaha kepada masyarakat sebagai pintu masuk untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Demikian juga produksi pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan belum dikembangkan secara optimal akibat keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, teknologi, dan sarana produksi pertanian.

Ambisi Regsosek adalah menghasilkan satu data untuk Indonesia yang mendeskripsikan kondisi sosial dan ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai basis untuk merumuskan program perlindungan sosial dan pelayanan dalam konteks percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Dalam konteks tantangan dan persoalan, bentang alam Kabupaten Manokwari dapat diatasi apabila para pihak mempunyai kesepakatan untuk merancang program dan kegiatan secara terpadu bersandar pada satu data. Pemanfaatan satu data produk Regsosek juga merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab negara untuk menghapus kemiskinan ekstrem di berbagai wilayah secara cepat adil tanpa diskriminasi.

C. Regsosek: Mencacah Angka Manokwari Papua Barat

Gema deklarasi kegiatan akbar Pendataan Awal Regsosek tahun 2022 seolah tertutup oleh pemberitaan tentang ekonomi, politik, dan peristiwa global yang menjadi menu media cetak dan elektronik di tanah air. Masyarakat sebagai penyedia informasi utama dalam kegiatan Regsosek justru tidak mendapatkan informasi yang sepadan sehingga bersikap antusias untuk menunggu kehadiran PPL. Ditilik dari apa yang akan dihasilkan, produk kegiatan awal Regsosek mempunyai nilai strategis, yaitu satu data kependudukan yang memuat gambaran sosial ekonomi penduduk yang akan digunakan kementerian dan lembaga terkait program penghapusan kemiskinan (ekstrem), perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan awal Regsosek tahun 2022 merupakan transformasi amanat Instruksi Presiden Nomor 4

Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (Inpres 4 Tahun 2022).

Untuk melaksanakan kegiatan Regsosek, BPS telah menyusun proses bisnis dan mekanisme Pendataan Awal Regsosek tahun 2022 sebagai peta jalan untuk melaksanakan kegiatan. Proses bisnis sebagai rancangan teknokratis disusun merujuk pada prinsip-prinsip dasar pendataan yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia, yaitu: privasi dan kerahasiaan, integritas, profesional, dan imparisial (ketidakberpihakan). Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip dasar yang harus ditaati dalam kegiatan pendataan (United Nations, 2015).

Peta jalan itu menjadi pedoman para pelaksana baik di tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Proses bisnis Regsosek, secara teknokratis, itu terdiri lima tahapan. *Pertama*, koordinasi dan konsultasi dengan para pihak untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan lapang serta sosialisasi, edukasi, dan publikasi tentang pengetahuan dan pemahaman kegiatan Regsosek. Keberhasilan Regsosek tidak semata tergantung pada BPS, namun juga ditentukan oleh dukungan dan komitmen para pihak di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat sebagai pelaku penyedia utama informasi untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pendataan. *Kedua*, penyiapan basis data dan kebutuhan teknis. Tahap ini adalah identifikasi wilayah pendataan mencakup satuan lingkungan setempat (SLS) (RT, banjar, lorong) dan wilayah khusus (pesantren, asrama, apartemen, penjara, barak militer). Bahkan, untuk akurasi pendataan juga dilakukan pada titik tertentu seperti pelabuhan untuk pendataan nelayan yang sedang bersandar dan tuna wisata melalui acara “Malam Regsosek”. Pada fase ini juga dilakukan rekrutmen dan pelatihan petugas untuk mendapatkan petugas yang terampil dalam melakukan pendataan dan penyiapan perlengkapan kerja lapang (kuesioner, lembar VK1, dan peta SLS, buku panduan lapang). Tahap *ketiga*, yaitu pelaksanaan pengumpulan data. Tahap ini merupakan fase berat yang dihadapi PPL. Faktor jarak, cuaca, dan sikap masyarakat menjadi tantangan yang dihadapi PPL. Di sisi lain, PPL dituntut melakukan pendataan secara cepat sesuai KK yang sudah tercantum dalam lembar VK 1

yang kemungkinan bisa bertambah dan berkurang. Untuk akurasi data, dalam proses pendataan, juga dilakukan penetapan lokasi (*geotagging*) yang dilengkapi dengan foto rumah responden dengan aplikasi Wilkerstat.

Tahap *keempat*, pengolahan data. Semua kegiatan pada tahap ini mulai dari pelingkupan, pelaksanaan, input data dan pengolahan data, dan pemeringkatan keluarga miskin merujuk pada kaidah teoritis dan metodologis dengan melibatkan BPS daerah sebagai validasi model. Tahap *kelima*, forum konsultasi publik. Wadah ini menjadi bentuk transparansi dari BPS sebagai lembaga penyedia data. Dalam artian, akurasi dan kebenaran hasil pemeringkatan terkait dengan status kesejahteraan bukanlah semata monopoli BPS sehingga hasilnya perlu dikonsultasikan dengan para pihak, yaitu kepala desa, pihak yang terkait dengan perlindungan sosial dan pelayanan, fasilitator, dan petugas entri data.

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa proses bisnis dan mekanisme kerja Regsosek adalah kerangka kerja yang mendeskripsikan kegiatan terinci pada setiap tahapan sebagai rujukan untuk pelaksanaan pendataan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Namun, tantangan terberat yang dihadapi para pelaksana adalah implementasi pendataan di tingkat lapang. Secara umum, Indonesia mempunyai kondisi geografis wilayah yang bervariasi. Daerah *remote* seperti pulau terpencil, wilayah pedalaman, dan pegunungan susah terjangkau karena terbatasnya akses dan keamanan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pendataan. Karakter sosial budaya masyarakat dan komunitas tertentu tidak bersedia menerima petugas untuk melakukan pendataan, mereka beranggapan pendataan adalah identik dengan bantuan. Sementara itu, di wilayah perkotaan pada lokasi khusus seperti apartemen dan kompleks perumahan, hanya pada waktu tertentu penghuninya bersedia untuk menerima kedatangan petugas. Tantangan lain yang menjadi kendala pendataan adalah kesulitan untuk mendapatkan tenaga di tingkat lokal yang menguasai kondisi dan karakter masyarakat pada lingkungannya.

Peta bisnis dan perencanaan adalah rangkaian agenda kerja yang menjadi rujukan bagi aparat BPS, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memproduksi data. Sebagai ilustrasi, dari hasil wawancara dengan Kepala dan staf BPS Kabupaten Manokwari, dalam konteks pendataan awal Regsosek, mereka memahami dan menaati seluruh tahapan proses bisnis dan mekanisme kerja serta melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sehingga tidak dapat menyimpang dari standar operasional yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, langkah kerja sebagai bentuk inovasi untuk menyukseskan pendataan Regsosek dihadapkan pada beberapa hambatan terkait dengan prinsip-prinsip proses bisnis, juga ketersediaan anggaran, situasi, dan kondisi politik lokal dan nasional. Sosialisasi Regsosek Kabupaten Manokwari dikemas melalui rapat koordinasi daerah (Rakorda) peserta terbatas pada level kecamatan. Di sisi lain, aparat desa sebagai aktor yang memahami lingkungan setempat dan memudahkan kerja petugas tidak dilibatkan sebagai peserta rakorda. Demikian juga, prakarsa melakukan publikasi melalui media luar ruang, media cetak, maupun elektronik dengan melibatkan pejabat publik dan tokoh masyarakat sebagai *endorser* selain dibatasi prinsip kerja, juga dibatasi oleh anggaran, birokrasi, dan situasi (politik) lokal.

Bagi lembaga produsen data di tingkat kabupaten dan pelaksana lapangan pendataan awal Regsosek 2022, persoalan seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi BPS Kabupaten Manokwari untuk menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPS Kabupaten Manokwari (kemungkinan) merupakan satu-satunya lembaga produsen data yang wilayah pendataannya mencakup tiga kabupaten dengan perkiraan pendataan 69.377 KK, terdiri dari Kabupaten Manokwari 52.280 KK, Kabupaten Manokwari Selatan 7.909 KK, Kabupaten Pegunungan Arfak 9.188 KK, dan tersebar di 23 distrik/kecamatan. Untuk pelaksanaan pendataan didukung oleh 419 orang PPL, 115 PML, dan 27 orang Koseka.

Dilihat dari komposisi antartarget pendataan dan jumlah PPL maka beban setiap PPL kurang lebih 165 KK. Target itu relatif lebih

kecil dibandingkan target pendataan di Pulau Jawa yang berkisar antara 200–250 KK setiap PPL. Namun, tantangan yang dihadapi bagi petugas di Tanah Papua maupun di Manokwari lebih berat dan bervariasi dibandingkan tantangan petugas di Jawa maupun wilayah yang lebih maju. Keterpencilan wilayah, keamanan dan karakter masyarakat, cuaca, dan domisili PPL yang sementara ini masih terkonsentrasi di Manokwari menjadi kendala yang dihadapi para petugas untuk menghimpun data secara cepat dan akurat di Tanah Papua. Hal ini saya rasakan selama dua hari mengikuti kerja PPL melakukan pendataan di dua desa di Tanah Rubu yang berjarak 70 km dari Manokwari dan Nimbay Kecamatan Warmare yang jaraknya kurang lebih 45 km.

Dengan menggunakan kendaraan roda dua, bersama PPL yang berdomisili di Kota Manokwari, untuk mencapai di wilayah Tanah Rubu perlu waktu kurang lebih dua jam. Walaupun kondisi jalan sudah beraspal, namun hambatan yang muncul adalah tanah longsor yang menutup ruas jalan yang hanya dibuka siang dan sore. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pekerjaan perbaikan jalan. Sampai di lokasi tujuan, waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 WIT. Dengan sisa waktu dan memperhitungkan keberadaan target di rumah, pendataan hanya menghasilkan 4 orang KK dari 10 rumah yang didatangi. Kondisi yang sama juga terjadi ketika mengikuti PPL melakukan pendataan di Desa Nimbay. Walaupun jaraknya relatif cukup dekat, PPL berdomisili 10 km dari lokasi pendataan, dan sudah memperhitungkan waktu luang responden, tetap saja pendataan tidak optimal. Dari 10 rumah yang didatangi, hanya lima rumah yang berhasil dilakukan pendataan karena faktor cuaca.

Menelisis pemahaman proses bisnis Regsosek tahun 2022 oleh para pihak di tingkat pusat sampai tingkat lapang dan pengamatan langsung terhadap kerja pendataan di wilayah kerja BPS Kabupaten Manokwari, paling tidak dapat memberikan gambaran, walaupun mungkin tidak utuh, tentang proses dan tantangan kerja pendataan di Tanah Papua. Dalam hal ini, pendataan awal Regsosek mempunyai spektrum yang kompleks, baik dalam lingkup cakupan lingkungan,

geografis, maupun karakter sosial wilayah. Persoalan dan tantangan yang dihadapi lembaga pelaksana di tingkat daerah sangat bervariasi sehingga strategi untuk melaksanakan pendataan berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Namun, di tengah perbedaan tersebut, untuk mewujudkan satu data terpadu terintegrasi setiap tahap kegiatan tetap mengacu pada prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam proses bisnis dan mekanisme kerja dalam seluruh proses pendataan.

Di balik kegiatan pendataan Regsosek, seharusnya juga dibaca bahwa berbagai program pembangunan selama ini masih menyisakan persoalan dan tantangan berat yang masih belum tertangani secara tuntas, yaitu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang masih melanda di berbagai wilayah. Selain itu, persoalan lain yang dihadapi pemerintah (pusat, kabupaten, desa) adalah terkait ketahanan pangan, perubahan iklim, akses terhadap pendidikan, kesehatan permodalan, dan infrastruktur yang dampaknya sangat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ilustrasi, jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2021 secara nasional adalah 10,14% (27.542.770 jiwa) dari total jumlah penduduk. Daerah dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua, yaitu 26,86% (920.440 jiwa) diikuti Provinsi Papua Barat 21,8% (219.070 jiwa). Secara nasional, jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem pada periode yang sama adalah 4% (10.785.346 jiwa) dari total penduduk, daerah dengan persentase tertinggi adalah Provinsi Papua Barat 13,6% (134.408 jiwa), diikuti Provinsi Papua Barat 13,1% (445.240 jiwa) (Suharto, 2022).

Salah satu masalah krusial yang dihadapi pemerintah (pusat dan daerah) untuk pengentasan kemiskinan adalah *pertama*, ketersediaan data yang akurat. Hal ini mengakibatkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan tidak tepat sasaran. Banyak kasus yang muncul di tingkat lapang di mana rumah tangga yang tidak berhak menerima bantuan sosial malah menerima bantuan (*inclusion error*). Sebaliknya, rumah tangga yang berhak menerima bantuan sosial, namun tidak menerima bantuan (*exclusion error*). *Kedua*, lemahnya integrasi antara program, anggaran, dan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem di pusat dan daerah. *Ketiga*, sinkronisasi dan koordinasi lintas organisasi

perangkat daerah (OPD) belum berhasil memastikan ketepatan sasaran kelompok miskin ekstrem. *Keempat*, proses penentuan target program belum inklusif.

Sebagai amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Regsosek adalah pintu masuk sebagai langkah awal untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan satu data terintegrasi. Satu data kependudukan hasil Regsosek menggambarkan secara terperinci postur kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk. Dengan satu data terintegrasi, pemerintah dapat merancang program perlindungan sosial, pemberdayaan dan meningkatkan pelayanan secara terpadu, tepat sasaran dan kebutuhan, dan menghindari terjadinya tumpang tindih seperti yang terjadi sebelumnya.

D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Tanggal 2 November 2022 menjadi perjalanan awal tim menuju salah satu desa di Kecamatan Tanah Rubu. Keberangkatan bersama dengan salah satu petugas PPL bernama DRK, yang merupakan keturunan asli dari Papua. DRK pun tidak sendiri dalam menjalankan tugas, terkadang istrinya ikut menemani untuk membantu dalam hal mewawancarai responden dan mencatat setiap tanggapan pada kuesioner Regsosek yang dilakukan antara DRK dan responden. Sekilas terlihat biasa saja, namun tersimpulkan suatu pernyataan bahwa kerja sama ini dapat meminimalisasi kesalahan data/informasi di saat responden memberi tanggapannya sehingga tidak ada data yang terlewat.

Keberangkatan dari kantor BPS Manokwari sekitar pukul 09.00 pagi dikarenakan terdapat longsor di jalan menuju Kecamatan Tanah Rubu. Sistem buka-tutup yang diterapkan oleh petugas membuat rombongan kecil harus mengatur waktu keberangkatan dan kepulangan agar tepat waktu. Perjalanan menuju Kecamatan Tanah Rubu berjarak 70 km dan ditempuh menggunakan sepeda motor. Sepanjang perjalanan diwarnai dengan lebatnya hutan di samping kiri dan kanan, jalan sudah beraspal rapi serta keindahan alam bahari yang

memesona. Nuansa teduh sepanjang jalan menuju Kecamatan Tanah Rubuh membuat rasa kagum, bersyukur dapat melihat langsung karya indah Tuhan di Tanah Papua.

Sampai di lokasi longsor tepat pukul 11.30 siang, waktu di mana portal dibuka sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Tanah Rubu. Selang sekian jam, akhirnya tibalah di Warami dan bertemu dengan Kepala Kampung yang sedang duduk-duduk di balai bersama dengan dua pemuda. Percakapan dimulai bersama dengan Kepala Kampung di kediaman beliau. DRK yang merupakan PPL pun memperkenalkan diri, menjelaskan program Regsosek yang dilakukan BPS Manokwari dan meminta izin kepada Kepala Kampung untuk mendata setiap warga. Kepala Kampung pun menyetujui serta berharap nantinya akan ada bantuan untuk setiaparganya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, maupun papan.

Terselip hal menarik ketika DRK memulai tugasnya untuk mendata warga yang ada di Warami. Pembawaan DRK yang santai dan bersahaja membuat warga sekitar langsung menerima kehadiran DRK, ditambah lagi DRK merupakan keturunan asli Papua, kedekatan emosional hampir pasti terjalin secara alami sehingga proses pendataan berjalan dengan lancar. Namun, di sela-sela pendataan, terjadilah pertemuan dengan salah satu keluarga yang menolak untuk didata, alasannya pun terbilang logis. Ibu ini mulai menaikkan nada bicaranya ketika DRK bertanya terkait dengan KK keluarga tersebut. Usut punya usut, ternyata keluarga ini sering didata oleh petugas yang entah dari mana asalnya lalu datang ke rumah meminta dokumen KK, namun sampai saat ini realisasi dari permintaan KK tersebut tidak pernah ada wujudnya. Berkali-kali dikecewakan membuat si ibu naik pitam ketika ada petugas yang lagi-lagi datang untuk meminta data mereka.

Pada akhirnya dengan sangat terpaksa, rumah tersebut dilewatkan untuk hari ini. DRK pun berkata bahwa besok akan datang lagi untuk menjelaskan kepada si Ibu terkait dengan pentingnya program Regsosek yang sekarang digagas oleh pemerintah. Tidak jarang juga selama proses pendataan menemukan rumah yang tidak dihuni sama

sekali. Hal ini disebabkan warga tersebut masih bekerja di ladang atau rumah tersebut memang sudah tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Persoalan seperti ini sering kali terjadi dan dialami juga oleh PPL di kabupaten lain. Di satu sisi, PPL harus kejar target untuk mendata seluruh warga di tempat penugasannya dengan berbagai hambatan yang beragam, di satu sisi juga harus ada *deadline* waktu pendataan yang harus ditaati.

Petugas PPL mau tidak mau, suka tidak suka, diharuskan untuk cepat, sigap, adaptif, dan kreatif. Pendataan kali ini bisa disimpulkan berjalan cukup lancar, harapan warga terhadap Regsosek ini pun cukup besar. Kebanyakan dari mereka mengharapkan tindak lanjut yang konkret saat pendataan selesai, yaitu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Tidak terasa hari mau menjelang sore, tim pun kembali pulang sembari menikmati senja yang perlahan memudar dibalik pantai yang tenang.

Keesokan harinya tim mendapatkan kesempatan untuk melihat PPL di daerah lain dalam melaksanakan tugasnya. Perjalanan ditempuh bersama dengan Pak Umam yang merupakan salah satu staf BPS Manokwari menuju ke salah satu desa yang bernama Nimbay, Kecamatan Warmare. Sepanjang perjalanan, lagi dan lagi, disuguhkan panorama indah nan menawan. Barisan perbukitan yang ditumbuhi pohon-pohon yang rindang sungguh memanjakan mata, rasa-rasanya alam Papua Barat mengizinkan kami untuk bertamu di sini.

Namun, tiba-tiba Pak Umam mendapat kabar yang kurang menyenangkan, rute yang nantinya dilalui sedang terjadi kerusuhan antarwarga sehingga kami memutuskan untuk melambatkan laju kendaraan. Selang beberapa lama sampailah di lokasi tempat warga bertikai. Benar saja ketika sampai di daerah itu hampir setengah jalan telah dihalangi oleh pohon serta ada beberapa pemuda dan orang tua yang berdiri di pinggir jalan. Tim memberanikan diri melewati mereka sambil mengucap permisi dan ternyata diizinkan lewat. Sungguh pengalaman yang membuat adrenalin meningkat dengan drastis.

Akhirnya, sampailah kami di sebuah rumah seorang PML yang bernama FR. Alasan singgah terlebih dahulu di rumah FR dikarenakan petugas PPL di bawah koordinasi FR sedang melakukan pendataan di Desa Nimbay. FR langsung menghubungi petugas PPL yang bertugas dengan maksud agar tim bisa bertemu langsung di lokasi. Setelah melakukan koordinasi, tim pun langsung bergegas ke Desa Nimbay untuk menemui petugas PPL tersebut. Sesampainya di Desa Nimbay, AJL dan IGT yang merupakan petugas PPL di Desa Nimbay kebetulan sedang melakukan wawancara di rumah warga. Proses pendataan yang dilakukan AJL dan IGT bisa dikategorikan cepat, kira-kira memakan waktu hanya 20 menit saja, padahal instrumen pertanyaan yang ada di form Regsosek tidak sedikit.

Kecepatan dan ketelitian yang dimiliki oleh AJL dan IGT sepertinya akan memudahkan mereka untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kondisi jalan aspal turut membantu petugas dalam menjangkau lokasi warga (Gambar 7.3). Beralih ke rumah sebelah, AJL mengetuk pintu rumah warga tersebut, namun tidak ada jawaban. Berkali-kali pintu rumah diketuk oleh AJL tetap tidak ada jawaban. Sepertinya penghuni rumah sedang bekerja di ladang, kendala ini pun sama dengan yang dialami DRK di Tanah Rubu. Beberapa rumah ternyata sudah dalam keadaan kosong karena warga yang mendiami rumah sedang di ladang atau sudah pindah.



Foto: Yudha (2022)

Gambar 7.3 Kondisi Jalan Menuju Desa Nimbay



Foto: Yudha (2022)

Gambar 7.4 Petugas PML dan PPL melakukan pendataan.

Hambatan ini dikhawatirkan memberikan efek domino pada penetapan realisasi target AJL dan IGT. IGT bercerita bahwa kunci sukses agar diterima oleh masyarakat setempat adalah sudah mengantongi izin kepala kampung terlebih dahulu. Namun, ternyata izin saja tidak cukup, beberapa warga juga sempat menolak kehadiran AJL dan IGT, meskipun mereka sudah mendapatkan izin dari Kepala Kampung. Dengan adanya berbagai hambatan, petugas tetap melaksanakan tugasnya untuk melakukan pendataan (Gambar 7.4). Namun, jika Regsosek sedari awal sudah disosialisasikan secara masif oleh pemerintah daerah, masyarakat sekitar pasti menerima kehadiran para petugas yang datang ke rumah mereka.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan

Teringat sebuah momen yang cukup menegangkan di saat melakukan perjalanan ke distrik Tanah Rubu. Perjalanan panjang sekitar 50 kilometer membuat badan terasa letih serta dahaga yang makin menjadi-jadi, akhirnya tim menepi untuk beristirahat dan makan siang. Kedatangan tim disambut oleh pasangan suami istri yang sejak tahun 2000 sudah mengadu nasib di Distrik Tanah Rubu, keputusan

yang sangat berani untuk berpindah ke tempat ini. Menurut beliau, di tahun 2000, Distrik Tanah Rubu hanyalah hamparan tanah luas serta dipenuhi dengan alang-alang yang merambat hampir di seluruh wilayah, belum ada rumah-rumah seperti saat ini. Seiring berjalannya waktu, keluarga ini dengan sangat gigih mencoba bertahan hidup dengan memulai usaha warung makan. Tidak disangka-sangka, Tanah Rubu saat ini sudah mulai ramai dengan para penduduk serta rumah yang sudah banyak dibangun, baik oleh warga maupun oleh pemerintah.

Di saat mulai menikmati makanan yang sudah dihidangkan, fokus teralihkan ke kantor distrik Kecamatan Tanah Rubu. Posisi kantor distrik persis di depan warung makan yang sedang disinggahi. Dari luar terlihat sepi dan terdapat seorang staf yang sedang duduk di sebelah pintu masuk. Rasa penasaran pun timbul, setelah selesai makan, tim berjalan menghampiri kantor distrik dengan harapan dapat bertemu dengan Camat Tanah Rubu untuk berdiskusi terkait dengan sosialisasi program Regsosek yang dilakukan oleh distrik pada seluruh kampung yang ada di Tanah Rubu. Percakapan dimulai dan masing-masing dari tim memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kepada staf tersebut. Kebetulan Camat serta staf yang lain tidak ada di tempat dan hanya beliau yang bertugas untuk menjaga kantor distrik hari ini.

Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba kami dihampiri oleh seorang pemuda yang sepertinya setengah sadar dan sedang di bawah pengaruh alkohol. Pemuda ini meminta tim untuk memasuki ruangan yang ada di kantor distrik sembari bertanya maksud dan tujuan kedatangan. Pemuda tersebut sudah ditolak dengan halus, namun tidak henti-hentinya memaksa untuk masuk ke dalam ruangan. Staf distrik pun memberikan isyarat agar lekas pergi dari kantor tersebut. Akhirnya tim pamit dan bergegas meninggalkan kantor distrik, namun masih sayup terdengar teriakan pemuda tersebut agar kembali ke kantor. Sungguh suatu kebetulan yang tidak disangka-sangka kejadian tersebut tidak memicu konflik atau kontak fisik, mengingat seseorang bila sudah

dipengaruhi alkohol susah untuk mengontrol dirinya sendiri. Lagi dan lagi kejadian barusan membuat adrenalin kami terpacu dengan cepat.

Perjalanan menuju Desa Warami untuk bertemu dan berdiskusi perihal program Regsosek dengan Bapak Martin selaku Kepala Kampung. Beliau menerima kedatangan kami dan tim memulai perbincangan dengan bertanya kepada Bapak Martin, apakah beliau mengetahui program Regsosek yang sekarang sedang berlangsung. Namun, beliau tidak mengetahui terkait dengan program Regsosek. Akhirnya muncul suatu pertanyaan, apakah sosialisasi terkait dengan Regsosek sudah masif dilakukan sampai di tingkat desa? DRK pun menjelaskan kepada Bapak Martin terkait dengan latar belakang hingga tujuan pemerintah mengadakan Regsosek. Terlihat Bapak Martin serius mendengarkan penjelasan dari DRK terkait dengan Regsosek.

Setelah berbincang cukup intens, usut punya usut beliau ternyata sempat menjadi sasaran amarah warga. Hal ini disebabkan tidak meratanya bantuan pemerintah yang pernah turun ke warga. Padahal data yang terkait dengan masyarakat kurang mampu sudah beliau berikan kepada kecamatan, misalnya ada 10 keluarga yang tergolong kurang mampu, namun hanya 3 keluarga yang diberikan bantuan. Tentunya hal ini dapat memicu konflik antarwarga dan jika dibiarkan terus-menerus, ke depannya pasti akan membuat kondisi lingkungan menjadi kurang kondusif. Bapak Martin sangat berharap melalui program Regsosek ini tidak ada warganya yang tertinggal, khususnya warga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan, dan juga semoga program Regsosek menjadi momentum untuk pemerintah dalam hal membenahi data kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Papua Barat.

Bapak Martin saat berbincang dengan tim peneliti (Gambar 7.5) menyatakan siap untuk berperan aktif dalam menyosialisasikan program Regsosek kepada seluruh warga yang ada di Desa Warami. Bapak Martin berencana untuk sesegera mungkin mengumpulkan seluruh warga dan menjelaskan langsung terkait dengan program Regsosek yang sekarang telah berjalan. Sosialisasi yang dilakukan



Foto: Yudha (2022)

Gambar 7.5 Perbincangan Bersama dengan Bapak Martin dan DRK

langsung oleh Kepala Kampung diharapkan dapat memantik antusiasme warga untuk bersedia didata ketika PPL datang ke rumah warga. Di sela-sela obrolan dengan Bapak Martin, terselip fakta menarik bahwa ada pihak lain di luar dari struktur perangkat desa yang dipercaya oleh kalangan masyarakat.

Pihak tersebut adalah Pendeta, sampai-sampai Bapak Martin berkata bahwa warganya lebih percaya kepada Pendeta dibandingkan pihak luar, bahkan pemerintah. Pemuka agama di kalangan masyarakat Papua memegang peranan penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pendeta menjadi sosok yang disegani dan dihormati oleh masyarakat, bahkan data pribadi seperti salinan kartu keluarga dan salinan kartu tanda penduduk ditiptkan kepada Pendeta. Bapak Martin juga ingin melibatkan Pendeta di Warami untuk membantu menyosialisasikan program Regsosek dengan harapan masyarakat lebih antusias lagi untuk menerima program Regsosek.

Antusiasme dan keseriusan Kepala Kampung Warami dalam menerima dan menjalankan program Regsosek tentunya menjadi awal yang baik bagi perbaikan kesejahteraan sosial warga ke depannya. Bapak Martin memilih untuk percaya bahwa program Regsosek ini akan berdampak baik untuk desa yang dipimpinnya. Data sosial ekonomi yang telah dikumpulkan pastinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan di

Papua Barat. Jika seluruh Kepala Kampung yang ada di Papua Barat mempunyai sikap yang sama dengan Bapak Martin, bukan tidak mungkin Papua Barat akan melesat maju dengan pesat.

Pembangunan yang didasarkan dengan kondisi sosial ekonomi dan kearifan lokal masyarakat setempat menjadi kombinasi yang terbilang sempurna. Di satu sisi, masyarakat mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, pembangunan disesuaikan dengan kondisi yang ada di wilayah tersebut tanpa menghilangkan esensi kearifan lokal di wilayah tersebut. Bapak Martin dan seluruh perangkat desa akan terus mengawal program ini. Terdapat banyak asa yang tertanam oleh semua warga desa Warami pada program Regsosek yang sedang dilakukan oleh BPS.

F. Beban yang Tak Ringan Pencacah Angka: Kisah Hidup

Sebelumnya tidak tebersit dalam benak para pengguna data (peneliti lain, perencana, dan pengambil kebijakan) bagaimana ragam data produksi BPS (hasil survei, registrasi, dan sensus) yang tersaji secara sistematis di *website* mudah diperoleh oleh setiap orang yang membutuhkan. Kita pun masih teringat pada saat pandemi COVID-19 di akhir tahun yang akhirnya menghancurkan perekonomian negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Lumpuhnya perekonomian, penerbangan, dan jasa perhotelan mengakibatkan pengangguran yang cukup besar. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia terlihat tidak siap dan gagap untuk menentukan target siapa dan berapa jumlah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang seharusnya menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial kenyataannya tidak memadai untuk menentukan target dan sasaran penerima bantuan secara cepat dan tepat. Setiap sektor akhirnya berusaha menentukan sasaran penerima bantuan dengan metode yang tidak seragam. Belajar dari momentum itu, tergambar

bahwa ketersediaan data yang akurat merupakan salah faktor penentu (determinan faktor) keberhasilan pembangunan maupun program perlindungan sosial dan pemberdayaan, baik dalam konteks nasional maupun daerah.

Pertanyaan besarnya, bagaimanakah peran BPS sebagai lembaga yang mendapat amanat untuk penyedia data bekerja? Tidak diragukan lagi bahwa BPS sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyediaan data dalam proses bisnis dan mekanisme pengumpulan berbagai kegiatan pengumpulan data, baik itu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Potensi Desa (PODES) bersandar pada metode yang akuntabel, transparan, dan imparial sebagai prinsip yang harus ditaati oleh lembaga penyedia data di seluruh dunia.

Salah satu kunci keberhasilan kegiatan pendataan yang dilakukan oleh BPS sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga PPL atau enumerator yang tersebar di seluruh wilayah pendataan. Tugas seorang PPL hasil rekrutmen baru ataupun PPL yang sudah pernah mengikuti kegiatan pendataan sebelumnya atau yang dikenal dengan “Mitra BPS” dipersiapkan secara matang melalui pelatihan dan pemberian peralatan pendukung sehingga menjadi PPL yang terampil. Walaupun langkah kerja perinci dalam proses bisnis pendataan sudah dipersiapkan, didesain secara praktis dan menjadi agenda kerja yang mudah dipahami, tantangannya adalah pada teknis pelaksanaannya. Mengingat tugas seorang PPL tidak hanya terbatas menguasai dan memahami pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner, tetapi juga dituntut mampu “menguras” data dari responden secara akurat, cepat, dan tidak menimbulkan persepsi yang berlebihan melalui strategi komunikasi yang tepat serta dapat mengatasi hambatan sosial di masyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya.

Tujuan tulisan dalam subbab ini menarasikan emik kegiatan awal Regsosek tahun 2022. Tulisan ini memberikan fokus pada kegiatan seorang PPL melakukan pendataan di tingkat lapang dengan mendeskripsikan secara rinci tentang latar kehidupan PPL, tujuan dan harapan menjadi PPL, dan pengetahuan tentang pelaksanaan

pendataan Regsosek, pengamatan selama PPL bekerja melakukan pendataan (cara memperkenalkan diri, melontarkan, dan menjelaskan pertanyaan yang tidak dipahami oleh responden).

Melalui pengamatan dan pencatatan selama kerja ini akan diperoleh mosaik secara utuh yang memberikan gambaran tentang etos kerja seorang PPL dalam melakukan pengumpulan data. Pemilihan objek dan lokasi pengamatan adalah hasil konsultasi dengan Koordinator Regsosek Kabupaten Manokwari dan PML di Kecamatan Warmare yang jaraknya kurang lebih 40 km dari Manokwari.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan PML, Desa Nimbay yang berjarak kurang lebih 10 km dari ibu kota kecamatan ditentukan sebagai lokasi pengamatan yang pada saat itu terdapat PPL yang sedang melakukan pendataan. Menggunakan kendaraan bermotor roda dua ditemani oleh PML dan berpatokan posisi lokasi yang dikirim melalui Whatsapp (*share location*), kami segera berangkat menuju Desa Nimbay menemui PPL yang sedang melakukan pendataan.

Ketika memasuki Desa Nimbay, di tengah desa, PML menunjuk seorang pemuda yang menggunakan *polo shirt*, bersepatu *sneaker*, dan membawa tas punggung sedang berdiri di depan pintu rumah warga yang ber dinding papan. Tim Regsosek minta untuk berhenti tidak usah menemui secara langsung. Pertimbangan mengambil keputusan itu adalah, dirasa tidak mendesak untuk sekadar menghentikan kerjanya hanya untuk melakukan wawancara menggali identitas diri dan latar belakang alasannya menjadi PPL. Momen langka ini penting untuk merekam dan mencatat tingkah laku dan ekspresi sang pendata mulai awal kegiatan sampai selesai melakukan pendataan.

1. Menakar Beban Pendata

Sambil berdiri di pinggir jalan, tak jauh dari rumah yang didatangi PPL, Tim fokus mengamati gestur PPL menghadap pintu rumah dan berusaha untuk tidak mengganggu aktivitasnya. Rupanya dia sudah beberapa saat berusaha untuk menemui pemilik rumah dan menunggu lama, namun belum dibukakan pintu dan dipersilakan masuk rumah. Ketika dibukakan pintu dan PPL memasuki rumah, tim bergegas

menemuinya. Berdiri di depan pintu, setelah memperkenalkan diri, Tim mengamati PPL sedang duduk di lantai semen yang beralas karpet plastik bermotif bunga. Dua gadis bersimpuh di depannya, salah satunya bermain ponsel dan satunya tersenyum menatap para tamunya. Gadis yang bermain ponsel dan acuh terhadap kedatangan PPL ternyata anak pemilik rumah, sedangkan gadis satunya adalah temannya. Sambil berbincang singkat, PPL membuka perbincangan dengan topik ringan di luar dari materi dalam kuesioner. Dari obrolan ringan terkuak bawa gadis ber-ponsel itu hanya berdua dengan sang ayah menempati rumah di Nimbay. Dia masih belajar di kelas dua SMA Warmare, ibunya sudah meninggal dan ayahnya baru bekerja di luar desa.

Setelah berorientasi, beradaptasi, dan mengamati kondisi dalam ruang tamu sederhana, PPL memperkenalkan diri secara perlahan dan hati-hari dia menjelaskan tujuan pendataan dan memohon gadis ber-ponsel bersedia menjadi responden untuk menjawab pertanyaan mewakili ayahnya dan meminta izin diperbolehkan melihat KK. Sambil menunggu tuan rumah mencari kartu KK, tim berusaha secara singkat menjelaskan tujuan pengamatan. Prinsipnya, bukan mengevaluasi kerjanya, melainkan tujuan utamanya ingin mengetahui secara detail dan sekaligus belajar tentang mekanisme kerja pendataan awal Regsosek, tantangan, dan hambatan selama melakukan pendataan.

Saat mendengarkan penjelasan singkat dari tim, pandangan matanya berganti-ganti arah, mengamati segala situasi rumah yang menjadi obyek pendataan. Seseekali melihat dapur yang terlihat dari celah pintu yang terbuka dan seseekali mendongak ke atas. Rupanya dia sedang mengamati detail kondisi rumah (lantai, dinding, plafon, dan pemilikan aset) sesuai dengan butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang kasat mata (sudah jelas) dan tidak perlu ditanyakan kepada responden. Kalaupun ditanyakan, hanya sebagai penegasan sebagai kewajiban yang harus dilakukan seorang PPL. Hal ini terbukti, ketika dia menerima kartu KK, dia segera mengambil kuesioner dan alat tulis dari tasnya dan segera melakukan pencatatan data dasar tentang keterangan perumahan (poin III dalam lembar kuesioner).

Sesekali ia melontarkan pertanyaan seperti sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, dan bahan bakar untuk kebutuhan memasak. Mengenai kebutuhan air, apakah berasal dari sumur atau mengambil dari mata air di luar pekarangan (mata air dan sungai), sedangkan kebutuhan memasak apakah menggunakan kayu bakar, minyak tanah atau bahan bakar gas. Ketika saya tanyakan mengapa pertanyaan itu diulang, *toh* dia sudah observasi tentang kondisi rumah responden yang terlihat jelas sederhana. Jawabannya cukup taktis, itu tidak boleh dilakukan, harus ditanyakan kepada responden. Kita tidak diperbolehkan berprasangka bahwa dengan kondisi rumah sederhana itu pasti mengambil air dari sungai ataupun menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak, bahkan tidak mempunyai lemari pendingin. Dengan pendekatan melalui obrolan singkat seperti itu, terbangun suasana menjadi lebih cair, hilang rasa kikuknya ketika bekerja di-dampingi orang yang baru dikenalnya.

Ketika beranjak ke pertanyaan IV, yaitu keterangan sosial, ekonomi anggota keluarga poin C (ketenagakerjaan), D (kepemilikan usaha), E (kesehatan program perlindungan sosial), F (perlindungan sosial), dan pertanyaan V terkait keikutsertaan program, terlihat responden kebingungan untuk menjawabnya. Hal ini disebabkan pertanyaan PPL yang disampaikan cenderung *textbook* sesuai dengan narasi pertanyaan dan jawaban tertulis di dalam kuesioner yang pengertiannya bersifat sangat teknis. Beberapa terminologi sebagai pilihan jawaban, seperti hortikultura, *real estate*, dan istilah ragam kepemilikan perizinan usaha adalah pilihan jawaban yang sulit untuk dipahami oleh responden yang sejak awal tidak konsentrasi, cenderung malu, takut, dan konsentrasi bermainponsel. Pada titik inilah PPL berulang kali menjelaskan secara singkat dengan mencari padanan pengertian yang sekiranya mudah dipahami responden.

Saat melontarkan pertanyaan tentang program perlindungan sosial dan keikutsertaan program, responden merasa kesulitan untuk memahami apa yang dimaksud dengan program Bantuan Sosial Sembako/BNPT, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Bahkan, PPL

mengalami kesulitan untuk menjelaskan secara mudah pengertian berbagai program sebagai salah satu pilihan jawaban yang harus diberikan responden. Sebagai ilustrasi, ketika ditanyakan berulang kali program apa saja yang pernah diterima, responden kebingungan untuk menjawab. Saat ditanya apa pernah mendapat bantuan dalam bentuk uang yang dibagikan oleh Kepala Kampung, responden secara cepat menjawab iya dan sampai saat ini terus menerimanya, dan PPL mengerti maksud dari jawaban tersebut. Padahal jawaban yang dikemukakan oleh responden tidak tersedia di dalam pilihan jawaban yang tersedia di kuesioner. Saat saya menanyakan kepada PPL apakah mengerti dan paham terhadap jawaban yang dikemukakan oleh responden, dia pun memahaminya.

Berdasarkan pengakuannya, konsep-konsep atau pengertian yang berada dalam kuesioner tersebut pasti akan susah dipahami oleh masyarakat apabila ditanyakan seperti yang tertera. Mereka hanya mengerti siapa yang membagi dan bukan nama program bantuannya. Menurut pengalamannya selama mendata dan didampingi oleh aparat desa, bantuan yang diserahkan oleh aparat desa selama ini adalah bersumber dari BLT Desa. Dalam beberapa kasus, sistem distribusi program bantuan pada beberapa desa tidak sama. Pada beberapa daerah, masyarakat menerima bantuan PKH yang dibagikan oleh petugas dari Dinas Sosial Kabupaten atau mereka mengambil di kantor pos. Sementara itu, penyaluran BLT Desa pada umumnya didistribusikan kepada masyarakat melalui kepala kampung.

Ketika PPL berkemas mengumpulkan berkas dan memasukkannya ke dalam tas, dia beranjak izin keluar untuk mendokumentasikan rumah dan menandai posisi/kedudukan rumah (*geotagging*) menggunakan ponsel. Tim baru sadar bahwa pendataan sudah selesai. Saat saya mengamati jam tangan, ternyata waktu yang dibutuhkan kurang lebih 20 menit. PPL mengajak kami untuk melanjutkan pendataan di rumah warga yang satu deret dengan rumah warga yang sebelumnya dilakukan pendataan. Sambil berjalan, saya dijelaskan tentang strategi pendataan yang dia lakukan. Pertama, dia melakukan koordinasi dengan kepala kampung untuk menjelaskan maksud dan tujuan pen-

dataan awal Regsosek, selanjutnya memverifikasi jumlah penduduk yang akan didata berdasarkan lembar VK 1. Jumlah keluarga yang tercantum dalam dokumen VK 1 lah yang menjadi target pendataan PPL. Jumlahnya bisa berkurang atau bertambah, disebabkan kematian dan adanya pendatang baru. Untuk menyesuaikan dan mempercepat pendataan, juga ditanyakan tentang kebiasaan warga saat berada di rumah dan mohon diinformasikan kepada masyarakat untuk menyiapkan kartu keluarga.

Melanjutkan pendataan dari target empat keluarga, satu keluarga tidak berada di rumah karena sedang bekerja di ladang. Saya mencatat, proses pendataan relatif berjalan lancar, AJL tidak perlu mengulang pertanyaan berkali-kali. Hal ini disebabkan tiga keluarga sudah biasa mendapat kunjungan petugas pendataan dan sebelumnya sudah mendapat informasi dari aparat kampung. Ketika saya bertanya berapa rumah yang dikunjungi dan berapa yang menolak atau tidak berada di tempat. Ternyata dari 10 keluarga yang ditargetkan, tidak ada yang menolak, tetapi sebanyak 4 orang tidak berada di tempat. Keadaan seperti itu menunjukkan suka dukanya melakukan pendataan yang targetnya tidak dapat dipastikan.

Anggota tim beruntung berkenalan dengan PPL yang terlibat dalam pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 di Desa Nimbay Kecamatan Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat. Target pendataan mayoritas adalah masyarakat lokal dan sedikit pendatang yang berasal dari Jawa, Buton, dan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemuda yang pertama kali saya lihat saat berdiri di depan rumah warga dengan baju *polo shirt*, sepatu jenis *sneaker*, dan menyandang tas punggung itu bernama AJL (semoga saya tidak salah mengeja). Lahir 21 tahun yang lalu di Desa/Kampung Indipi Hilir Kecamatan Warmare dari seorang ibu, putri seorang transmigran, ayah berasal dari Buton yang saat ini bekerja di SMA Warmare. Indipi Hilir adalah salah satu desa yang awalnya adalah permukiman transmigrasi di Kabupaten Manokwari.

Dengan latar belakang itu, beliau adalah generasi ketiga transmigran di Desa Indipi Hilir. Saat ini dia kuliah di Universitas

Pendidikan Muhammadiyah Sorong Fakultas Pendidikan Jasmani. Di tengah waktu menyiapkan skripsi, seorang teman menawari untuk mendaftar menjadi PPL Registrasi Sosial Ekonomi. Dengan alasan mencari pengalaman baru dan mengisi waktu luang akhirnya dia mendaftar dan diterima menjadi PPL yang bertugas di Desa Nimbay dan Subsay Kecamatan Warmare. Jarak lokasi pendataan 10 km dari tempat tinggalnya sehingga sudah tidak asing dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi target pendataan. Untuk perekrutan tenaga pendata (PPL), kebijakan BPS adalah mengutamakan tenaga kerja setempat yang lebih menguasai karakter sosial dan lingkungan wilayah pendataan.

Dia menyadari setelah mendapat pelatihan dan diberi tugas pendataan di dua desa, beban tanggung jawab yang dirasakan PPL tidaklah ringan. Ditambah dengan target keluarga yang mayoritas masyarakat lokal. Hal yang paling dirasakan adalah memahami pertanyaan yang berjumlah kurang lebih 68 dengan ragam pilihan jawaban. Untuk memahami, ia harus membaca berulang-ulang. Di dalam praktiknya, target yang sudah ditetapkan di lembar VK-1 besar kemungkinan bertambah dan itu tidak dapat diprediksi. Hal ini terbukti pada saat dia konfirmasi dengan Kepala Kampung Nimbay, jumlah penduduk Nimbay lebih besar dibandingkan jumlah yang tercantum dalam VK 1. Selain itu, faktor cuaca, jarak, keberadaan keluarga di rumah, dan penolakan adalah tantangan yang sudah terpikir dibenaknya. Ketika ditanya, mengapa pertanyaan diajukan dan dijelaskan secara singkat, *to the point*, dan cenderung lugas? AJL menjawab teknik itu dilakukan untuk menghindari rasa bosan dan tidak menyita waktu, mengingat bahwa responden bersedia meluangkan waktu untuk wawancara itu lebih dari cukup serta mengejar target pendataan. Dalam perbincangan itu, ia mengaku punya sifat introver (tertutup) dan tidak biasa berdialog melakukan percakapan yang bertele-tele.

2. Momentum Refleksi

Berkenalan dengan AJL dan mengikuti dia bekerja melakukan pendataan awal Regsosek tahun 2022 di Desa Nimbay, Kabupaten Manokwari Papua Barat, yang sebagian besararganya masyarakat

lokal, adalah momentum historis dan memberikan pengalaman berharga yang tidak mungkin saya lupakan. Walaupun dengan waktu relatif singkat, banyak pelajaran yang dapat diperoleh serta telah membuka mata dan pikiran bagaimana memaknai data dan proses merangkainya. Dalam konteks pendataan awal Regsosek 2022, seorang PPL adalah subsistem dari proses bisnis dan mekanisme kerja BPS. Akurasi hasil pendataan salah satunya ditentukan oleh kinerja PPL.

Petugas pendataan tidak hanya dituntut mampu dan memahami 68 pertanyaan serta menentukan beragam jawaban dengan pengertian yang bersifat teknis yang tercantum dalam kuesioner. Kondisi wilayah kerja dengan karakteristik sosial, adat istiadat, dan lingkungan geografis berbeda, jelas membutuhkan strategi yang tidak sama. Tidak hanya terbatas pada dukungan anggaran, tetapi juga strategi komunikasi yang tepat dan mudah dipahami oleh keluarga yang menjadi target pendataan. Beberapa catatan penting lainnya, antara lain sudah saatnya untuk jenis pendataan mendatang perlu kiranya untuk menjelaskan secara mudah, khususnya, konsep program dan terminologi, seperti PKH, BLT Desa, BNPT, SITU, SIUP, dan NRDDP. Demikian pula dalam konteks sosialisasi dan koordinasi, sebaiknya tidak berhenti pada level kecamatan, tetapi juga melibatkan pemerintah desa/kampung. Di lapangan, otoritas di tingkat desa mempunyai peran penting dalam rangka menyosialisasikan pendataan. Terlalu berlebihan rasanya apabila pembelajaran dari seorang PPL di Tanah Papua dalam waktu singkat ini mewakili profil seorang pendata sebagai mitra BPS. Akurasi data dalam kegiatan pendataan apa pun, salah satunya ditentukan oleh kinerja sang pendata yang memegang prinsip profesionalitas, dapat menjaga kerahasiaan, dan tidak berpihak.

G. Menarasikan dan Memaknai Angka Entitas Keluarga

Pada konteks pendataan yang terkait kependudukan, masyarakat adalah “objek” penyedia informasi. Dalam pendataan awal Regsosek tahun 2022, keterangan perumahan, kondisi sosial ekonomi (demografi,

pendidikan, ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, kesehatan, program perlindungan sosial) dan keikutsertaan program serta kepemilikan aset dan layanan adalah aspek penting yang melekat pada setiap orang dan menjadi sasaran pendataan. Dalam lembar kuesioner Regsosek tahun 2022 poin-poin itu tertuang pada 68 pertanyaan yang dilontarkan pendata kepada responden. Untuk mendapatkan berbagai informasi secara cepat, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses pendataan adalah terganggunya privasi saat pengumpulan data dan kekhawatiran penggunaan informasi rahasia individu (responden).

Dalam konteks ini, komponen pertanyaan yang terkait dengan kepemilikan aset harus spesifik, mudah dipahami, dan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, harus diperhatikan lama waktu wawancara saat pengumpulan agar tidak mengganggu kehidupan responden. Kedua aspek tersebut merupakan salah satu tantangan tersulit yang dihadapi oleh petugas pendata di tingkat lapangan.

Keragaman karakter sosial budaya, adat istiadat masyarakat di Indonesia membutuhkan pendekatan dalam kerja pendataan penduduk. Dalam banyak kasus terdapat masyarakat yang menolak kedatangan petugas, mereka beranggapan tabu untuk memberikan informasi identitas yang melekat pada dirinya. Tidak menutup kemungkinan kesalahan kecil seperti pemanfaatan alat komunikasi ponsel untuk mengambil beberapa bagian rumah menyebabkan perampasan dan denda ke petugas. Seringnya kegiatan pendataan juga berdampak terhadap persepsi masyarakat. Mereka menganggap bahwa pendataan adalah identik dengan bantuan. Masyarakat yang kebetulan didata sesuai dengan kebutuhan, pada akhirnya melekat dibenaknya bahwa ketika dilakukan pendataan ulang mereka memastikan akan mendapatkan bantuan. Sebaliknya, masyarakat yang berkali kali dilakukan pendataan dalam konteks yang lain dan bukan sebagai target akan merasa bahwa mereka mendapat perlakuan tidak adil.

Beberapa masalah tersebut seolah menjadi biasa dan hal yang selalu dialami petugas saat mereka bekerja. Pada masa mendatang, para pemangku kepentingan perlu membangun kerja sama agar proses pendataan tidak dipandang negatif oleh masyarakat. Proses

pendataan bukan menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan juga para pemangku kepentingan. Para pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mempunyai kesadaran bersama untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan data, baik melalui koordinasi maupun sosialisasi kegiatan pendataan.

Di masa mendatang, keberhasilan pengumpulan data akan ditentukan oleh kolaborasi para pihak yang mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga harus membuktikan bahwa data yang bersumber dari masyarakat telah bertransformasi dalam bentuk program dan kegiatan nyata untuk peningkatan kesejahteraan.

Gambaran singkat tentang potret keluarga penyedia informasi ini terekam saat mengikuti PPL melakukan pendataan di Desa Nimbay, salah satu desa dengan kategori tertinggal di Manokwari dan mayoritas penduduknya adalah masyarakat asli Papua. Ketika PPL dibukakan pintu, saya bergegas mendatangi rumah yang menjadi target pendataan untuk mengetahui bagaimana potret keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Ternyata yang menyambut kedatangan PPL adalah dua gadis muda, yang satu berperawakan jangkung memegang ponsel dan satunya berperawakan langsing. Mereka berdua tidak segera mempersilakan kami masuk ke dalam rumah. Dari ekspresi wajahnya, kedua gadis tampak kaget, malu, dan kelihatan ragu untuk menerima kedatangan kami berdua. Setelah dijelaskan singkat oleh PPL, baru kami dipersilakan untuk memasuki rumah dan duduk di ruang tamu berlantai semen.

Dengan cepat PPL menjelaskan kembali maksud dan tujuan kedatangannya dan sebelum memulai wawancara minta kepada tuan rumah untuk memperlihatkan kartu keluarga. Saat dia beranjak menuju kamar untuk mencari dokumen keluarga, saya mengamati secara cepat situasi dalam rumah ber dinding bambu dan berlantai semen itu. Ternyata PPL juga melakukan hal yang sama, mencermati detail isi rumah. Rumah sederhana ini tidak tertutup plafon, mempunyai dua kamar bersebelahan tidak berpintu, dan ditutup dengan kain gorden berwarna biru. Di dalam ruang tamu terdapat lemari kecil,

di atasnya terdapat televisi warna putih tertutup kain berenda. Dilihat dari bentuknya, televisi itu model lama dan masih belum berwarna. Pada bagian belakang terdapat pintu kayu yang menghubungkan rumah induk dengan dapur terbuka.

Gadis yang memegang ponsel keluar kamar membawa kartu keluarga dan menyerahkan kepada PPL yang saat itu masih berorientasi dan beradaptasi dengan situasi rumah. Setelah menerima KK, PPL dengan cepat menyalin informasi dalam kartu keluarga dan sesekali bertanya kepada tuan rumah apabila ada beberapa hal yang dirasa tidak jelas. Ketika selesai mencatat identitas diri dari KK, PPL menjelaskan ulang yang ketiga kalinya tentang tujuan pendataan. Pada saat memulai wawancara dan menanyakan keberadaan kepala rumah tangga, gadis yang ternyata bernama MGD itu, sambil tetap memainkan ponselnya, menjawab bahwa saat ini dan setiap hari ayahnya bekerja di kebun di luar desanya. Sambil mempersiapkan diri untuk memulai pendataan, PPL menjelaskan kepada saya situasi seperti ini sering dialami petugas ketika melakukan pendataan. Ketika kepala keluarga tidak berada di rumah, pihak yang mewakili memberikan informasi pada umumnya diwakili oleh istri ataupun anaknya yang saat itu kebetulan berada di rumah.

Mengetahui bahwa responden diwakili oleh anak gadis kepala keluarga, dengan hati-hati PPL segera menanyakan identitas keluarga secara sabar dan hati-hati agar dapat dijawab dengan mudah. Sambil mendengarkan wawancara, saya berusaha untuk mengikuti secara saksama agar dapat memotret jati diri responden sebagai penyedia informasi dalam kegiatan pendataan awal Regsosek tahun 2022. Sesekali secara singkat saya juga ikut bertanya untuk mendapatkan penjelasan terkait dengan beberapa hal yang saya tidak mengerti. Selama mengikuti wawancara, saya berusaha untuk merangkai jawaban responden menjadi mosaik yang utuh sehingga dapat menggambarkan profil masyarakat sebagai penyedia informasi dalam pendataan Regsosek dan mungkin karakter masyarakat pada kegiatan pendataan lainnya. Dari hasil penuturan anak perempuan yang masih sekolah di tingkat SMA ini secara jelas terungkap jati diri salah satu profil pendataan di satu desa di Papua.

Ayah responden dengan inisial MGD menempuh pendidikan hingga sekolah dasar dan kemudian bekerja sebagai petani. Jumlah keluarga saat ini tiga orang, dua orang sudah berkeluarga dan bertempat tinggal di luar desa, sedangkan satu anak perempuan saat ini masih bersekolah kelas 2 di SMA. AI saat ini hidup di Desa Nimbay hanya ditemani oleh anaknya (yang mewakili kepala keluarga saat pendataan), sedangkan istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Untuk menghidupi keluarganya, AI bekerja sebagai petani, dengan mengusahakan kebun di belakang rumah dan kebun pisang di luar desa. AI menempati rumah sederhana layak huni berdinding papan, mempunyai jendela di setiap ruangan, dan beratap seng dengan halaman bersih tampak rapi. Di belakang rumah terlihat kamar mandi dan WC dengan bangunan permanen terpisah dari rumah induk.

Di Desa Nimbay ini hampir di semua rumah mempunyai kamar mandi dan WC di belakang rumah dengan bangunan yang sama. Dari penjelasan aparat desa, kamar mandi dan WC adalah bantuan dari Pemerintah Desa dan dananya bersumber dari dana desa. Terdapat berbagai jenis tanaman kebun belakang, seperti pisang, nangka, rambutan, langsung, mangga, pohon kelapa, dan singkong. Seperti umumnya, kebun masyarakat desa Nimbay tidak diusahakan secara intensif, hasil panen buah setiap musim sebagian dijual untuk menopang kehidupan dan sebagian sebagai konsumsi keluarga.

Berdasarkan penjelasan anaknya, keluarga AI adalah satu anggota masyarakat Desa Nimbay penerima program bantuan BLT Desa dan program subsidi listrik. Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa AI adalah keluarga tidak mampu (miskin) yang berhak mendapat perlindungan sosial. Dengan kedua bantuan tersebut, diharapkan mereka mampu hidup di tengah kesulitan ekonomi melalui kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Namun, ketika diajukan pertanyaan dalam kuesioner yang mencantumkan jenis bantuan program seperti program bantuan sembako, subsidi listrik, bantuan pemerintah daerah, subsidi pupuk, dan subsidi LPG mereka tidak dapat menjawab dengan pasti. Selama mengikuti pendataan, keluarga yang menerima bantuan, pada umumnya tidak mengetahui jenis program. Mereka

hanya mengetahui bahwa selama ini menerima bantuan uang yang disalurkan pemerintah desa dan dibebaskan dari biaya langganan listrik.

Keterbatasan terhadap literasi pendataan dan berbagai jenis bantuan sebagai bagian dari perlindungan sosial selama ini justru menimbulkan kecenderungan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Anggapan yang muncul di dalam benak masyarakat adalah bahwa pendataan adalah identik dengan bantuan. Hal ini melekat pada sebagian masyarakat yang telah beberapa kali dilakukan pendataan pada akhirnya terbukti menerima bantuan. Di sisi lain, juga muncul anggapan bahwa pendataan tidak bermanfaat. Anggapan ini tertanam pada mereka yang telah beberapa kali dilakukan pendataan dan diminta menunjukkan kartu keluarga, tetapi pada kenyataannya tidak pernah mendapat bantuan. Kemungkinan yang terjadi adalah mereka memahami bahwa kegiatan pendataan dalam program perlindungan bertujuan mendapatkan informasi tentang kondisi sosial masyarakat dan hanya mereka yang mempunyai kriteria tertentu menjadi target program dan berhak menerima bantuan. Dari hasil diskusi dengan aparat BPS, ragam persepsi masyarakat target pendataan tersebut selalu dihadapi setiap pendataan dilakukan petugas BPS. Masyarakat tidak menyadari bahwa semua kegiatan BPS yang dilakukan secara periodik tidak bertujuan mencari target pemberian bantuan perlindungan sosial (bantuan keuangan, peralatan kerja, sarana produksi pertanian dan usaha produktif keluarga, dll.)

H. Mengungkap Kemiskinan: Suatu Penutup

Kemiskinan ekstrem adalah salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini. Berbagai program dan kegiatan pembangunan selama ini seolah tidak dapat mengatasi persoalan tersebut. Berbagai kalangan menilai bahwa persoalan klasik yang menjadi persoalan pembangunan adalah ego sektoral yang sangat tinggi dari para pihak yang mempunyai otoritas terkait dengan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, pengalaman juga menunjukkan bahwa perencanaan program pembangunan tidaklah berbasis data yang valid. Kedua persoalan

menyebabkan tumpang tindih program dan kecenderungan bantuan yang seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, khususnya terkait dengan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Regsosek berupaya membangun satu data terintegrasi sebagai pintu masuk bagi para pihak untuk merancang berbagai program perlindungan sosial sesuai kebutuhan sasaran penerima manfaat secara akurat.

Satu data hasil Regsosek secara jelas mampu menggambarkan status kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah dengan karakter berbeda sehingga tidak ada lagi argumen para pihak untuk tidak memanfaatkannya. Pemanfaatan satu data terpadu sebagai basis perencanaan program pembangunan adalah wujud komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan pemicu pengentasan kemiskinan ekstrem.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Manokwari. (2022). *Kabupaten Manokwari dalam angka 2022*. <https://manokwarikab.bps.go.id/publication/2022/02/25/3853bce77629ca52ec2d6b44/kabupaten-manokwari-dalam-angka-2022.html>
- BPS Provinsi Papua Barat. (2022). *Provinsi Papua Barat dalam angka 2022*. <https://papuabarot.bps.go.id/publication/2022/02/25/55355ed63b32c5ab9dad5f0b/provinsi-papua-barat-dalam-angka-2022.html>
- BPS Kabupaten Manokwari. (2021). *Indeks pembangunan manusia Kabupaten Manokwari tahun 2020*. <https://manokwarikab.bps.go.id/publication/2021/12/31/4cadd2cfefb380b59b8cf206/indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-manokwari-2020.html>
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2022). *Peringkat nilai rata-rata indeks desa membangun tahun 2022: Provinsi-kabupaten-kecamatan-desa*. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>
- Dowansiba, K. (2020, 22 Agustus). Dampak buruk Kehadiran pabrik semen Maruni di Manokwari. *Laolao*. <https://laolao-papua.com/2020/08/22/catatan-awal-dampak-buruk-kehadiran-pabrik-semen-maruni-manokwari/>

- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/211477/inpres-no-4-tahun-2022>
- Peta Administrasi Kota Manokwari. (t.t). *Petatematikindo*. Diakses pada 15 November 2022, dari <https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/administrasi-manokwari1.jpg>
- Suharto, W. (2022). Penguatan kapasitas daerah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem [Presentasi PowerPoint]. https://smeru.or.id/sites/default/files/events/wahyu_suharto_-_penguatan_kapasitas_daerah_dalam_penghapusan_kemiskinan_ekstrem.pdf
- United Nations. (2015). *Conference of European statisticians: Recommendations for the 2020 censuses of population and housing*. https://unece.org/DAM/stats/publications/2015/ECECES41_EN.pdf